

## Kualitas Data Kependudukan sebagai Determinan Tata Kelola Data Pendidikan Nonformal

Indah Maissy Wowor<sup>1</sup>, Goinpeace H Tumbel<sup>2</sup>, Laurens Bulu<sup>3</sup>

Universitas Negeri Manado, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [indahmaissy15@gmail.com](mailto:indahmaissy15@gmail.com)

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 07 Mei 2026

### ABSTRACT

Educational data management has become an essential component in supporting data-based public services within the education sector. In nonformal education, data governance frequently encounters various challenges, particularly regarding the validity and integration of student population data in the Data Pokok Pendidikan (Dapodik) system. This study aims to analyze population data quality as a determinant of nonformal education governance at SPNF SKB in South Bolaang Mongondow Regency. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving education data operators, nonformal education managers, and relevant stakeholders. Data analysis was conducted descriptively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that population data quality is the most dominant factor influencing nonformal education governance. Inconsistencies in Population Identification Numbers (NIK), duplicate data, and discrepancies in administrative identity documents hinder the validation and synchronization processes of educational data within the Dapodik system. In addition, data governance effectiveness is also influenced by data control mechanisms, coordination among institutions, and the availability of operational guidelines for educational data management. Therefore, improving population data quality and strengthening integrated data governance systems are essential to support effective, accurate, and accountable nonformal education services.

**Keywords:** Population data quality, educational data governance, nonformal education, Dapodik, public administration.

### ABSTRAK

Pengelolaan data pendidikan menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik berbasis data pada sektor pendidikan. Pada pendidikan nonformal, tata kelola data masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya berkaitan dengan validitas dan integrasi data kependudukan peserta didik dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas data kependudukan sebagai determinan tata kelola pendidikan nonformal pada SPNF SKB di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan operator data pendidikan, pengelola pendidikan nonformal, dan pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan merupakan faktor paling dominan dalam tata kelola pendidikan nonformal. Ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), data

---

*ganda, dan perbedaan identitas administrasi menyebabkan proses validasi dan sinkronisasi data pendidikan dalam sistem Dapodik mengalami hambatan. Selain itu, efektivitas tata kelola data juga dipengaruhi oleh mekanisme pengendalian data, koordinasi antar lembaga, dan ketersediaan pedoman operasional pengelolaan data pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas data kependudukan dan penguatan sistem tata kelola data terintegrasi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pelayanan pendidikan nonformal yang efektif, akurat, dan akuntabel.*

**Kata Kunci:** *Kualitas data kependudukan, tata kelola data pendidikan, pendidikan nonformal, Dapodik, administrasi publik.*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan data pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dari administrasi publik karena berkaitan dengan proses pengelolaan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah melalui sistem pendidikan nasional. Administrasi publik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas birokrasi, tetapi juga sebagai proses pengelolaan sumber daya, informasi, dan pelayanan publik secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah (Tumbel, 2023). Dalam perspektif administrasi publik modern, kualitas data menentukan efektivitas pelayanan publik karena kebijakan yang disusun pemerintah sangat bergantung pada akurasi dan validitas informasi yang tersedia. Pengelolaan pendidikan berbasis data (*data-driven policy*) semakin menjadi kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan modern, termasuk pada sektor pendidikan nonformal.

Dalam sistem pendidikan nasional, pengelolaan data pendidikan telah diintegrasikan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang digunakan sebagai basis data nasional pendidikan. Sistem ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengelola data peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, serta berbagai kebutuhan administratif pendidikan lainnya. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat melakukan sinkronisasi data pendidikan secara nasional sehingga kebijakan pendidikan dapat disusun berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi (Aini, Rulinawaty, and Wijaya 2024).

Data kelola data pendidikan yang baik tidak hanya berkaitan dengan proses penginputan data, tetapi juga mencakup proses validasi, pengendalian, sinkronisasi, serta integrasi data kependudukan peserta didik (Putu, 2022). Oleh karena itu, kualitas data menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas tata kelola pendidikan.

Pemerintah Indonesia telah memperkuat sistem tata kelola data pendidikan melalui berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang mewajibkan setiap satuan pendidikan melakukan pendataan secara berkala, akurat, dan berkelanjutan. Selain itu, integrasi data pendidikan dengan administrasi kependudukan diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 yang menekankan pentingnya validitas data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Regulasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan menjadi elemen penting dalam sistem tata kelola pendidikan nasional.

Kebutuhan terhadap tata kelola data yang akurat tidak hanya berlaku pada pendidikan formal, tetapi juga pada pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal

---

memiliki peran strategis sebagai jalur pendidikan alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal secara optimal. Pendidikan nonformal menjadi bagian penting dalam menjamin pemerataan layanan pendidikan dan perluasan akses pendidikan masyarakat. Namun, karakteristik pendidikan nonformal yang heterogen, tingkat mobilitas peserta didik yang tinggi, serta keterbatasan administrasi kependudukan peserta didik menyebabkan tata kelola data pendidikan nonformal memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibanding pendidikan formal (Ariani, 2024).

Dalam praktiknya, pengelolaan data pendidikan nonformal masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait validitas data peserta didik. Salah satu permasalahan utama adalah masih ditemukannya data residu peserta didik, yaitu data yang belum memenuhi standar validasi sistem seperti ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), belum memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), data ganda, maupun data yang belum tersinkronisasi dengan sistem administrasi kependudukan (Bigovic, Santosa, and Putri 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola data pendidikan belum berjalan optimal, terutama dalam proses validasi dan integrasi data kependudukan peserta didik.

Permasalahan tersebut juga terjadi pada satuan pendidikan nonformal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Data Dinas Pendidikan tahun 2025 menunjukkan masih tingginya jumlah data residu peserta didik pada beberapa satuan pendidikan nonformal, baik dalam bentuk residu NISN, ketidaksesuaian NIK, maupun data kependudukan ganda. Kondisi tersebut menyebabkan proses validasi data peserta didik membutuhkan perbaikan secara berulang dan berdampak terhadap berbagai layanan administrasi pendidikan. Ketidakvalidan data peserta didik tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memengaruhi pelayanan pendidikan seperti penyaluran bantuan pendidikan, penerbitan ijazah, validasi peserta didik, serta pengelolaan program pendidikan nonformal.

Permasalahan kualitas data kependudukan menunjukkan bahwa tata kelola data pendidikan nonformal tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis penginputan data oleh operator pendidikan. Tata kelola data pendidikan merupakan bagian dari proses manajemen publik yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta pengendalian kualitas data pendidikan. Dalam perspektif tata kelola data (*data governance*), data dipandang sebagai sumber daya organisasi yang harus dikelola secara sistematis untuk menjamin kualitas, validitas, dan konsistensi data dalam mendukung pelayanan publik. Oleh karena itu, kualitas data kependudukan peserta didik menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas tata kelola pendidikan nonformal.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan data pendidikan masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Penelitian Angga (2022) menemukan bahwa implementasi kebijakan pendataan pendidikan belum berjalan optimal akibat lemahnya komunikasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian Rodiyah et al. (2024) menunjukkan bahwa struktur birokrasi dan koordinasi antarinstitusi menjadi hambatan dalam implementasi administrasi pendidikan berbasis sistem informasi. Selain itu, penelitian Amalia et al. (2025) menemukan banyak ketidaksesuaian data peserta didik pada pendidikan kesetaraan

---

akibat keterbatasan pemahaman pengelola data pendidikan nonformal. Penelitian Fajri, Sofyan, dan Niswanto (2025) juga menunjukkan bahwa ketidakakuratan data peserta didik berdampak terhadap ketidaktepatan penyaluran bantuan pendidikan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengelolaan data pendidikan dan implementasi sistem informasi pendidikan, kajian mengenai kualitas data kependudukan sebagai determinan tata kelola pendidikan nonformal masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada implementasi kebijakan pendidikan, efektivitas sistem informasi, maupun administrasi pendidikan formal. Sementara itu, penelitian mengenai tata kelola data pendidikan nonformal yang menempatkan kualitas data kependudukan sebagai faktor determinan utama dalam validasi dan integrasi data pendidikan belum banyak dilakukan, khususnya pada satuan pendidikan nonformal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas data kependudukan sebagai determinan tata kelola pendidikan nonformal pada SPNF SKB di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana kualitas data kependudukan memengaruhi validasi, sinkronisasi, dan efektivitas tata kelola data pendidikan nonformal dalam sistem Dapodik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam kualitas data kependudukan sebagai determinan tata kelola pendidikan nonformal pada SPNF SKB di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya memahami fenomena tata kelola data pendidikan secara kontekstual berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses, interaksi, serta permasalahan administratif dalam pengelolaan data pendidikan nonformal (Tumbel, 2023). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan fokus pada pengelolaan data pendidikan nonformal di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan instansi yang membidangi pendidikan nonformal. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada masih ditemukannya berbagai permasalahan data residu peserta didik dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), seperti ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), data ganda, serta data peserta didik yang belum tervalidasi dalam sistem administrasi kependudukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan data pendidikan nonformal, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen pendataan, laporan administrasi pendidikan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan tata kelola data pendidikan nonformal. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan pemahaman informan terhadap pengelolaan data pendidikan nonformal. Informan penelitian meliputi pengelola satuan pendidikan nonformal, operator Dapodik, operator data pendidikan pada

tingkat dinas, serta pihak yang terlibat dalam proses validasi data peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai proses validasi data peserta didik, kendala sinkronisasi data kependudukan, serta pengendalian data pendidikan dalam sistem Dapodik. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pengelolaan data pendidikan nonformal, khususnya proses penginputan, pengecekan, dan validasi data peserta didik. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa laporan data residu, dokumen administrasi peserta didik, serta dokumen pendataan pendidikan lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Dunn 2011). Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas data kependudukan dalam tata kelola pendidikan nonformal. Keabsahan data penelitian dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan konsistensi dan validitas data penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola data pendidikan nonformal pada SPNF SKB di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan kualitas data kependudukan peserta didik. Permasalahan tersebut meliputi ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), data ganda peserta didik, perbedaan identitas pada dokumen administrasi, serta data peserta didik yang belum tervalidasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kondisi tersebut menyebabkan proses sinkronisasi dan validasi data pendidikan memerlukan perbaikan secara berulang dan berdampak terhadap efektivitas pelayanan administrasi pendidikan nonformal.

**Tabel: 1 Data Residu Peserta Didik Pendidikan Nonformal Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**

No	Satuan Pendidikan	Residu NISN	Residu NIK	NIK Ganda
1	SPNF SKB Bolmong Selatan	134	40	29
2	PKBM Perspektif	74	59	13
3	PKBM Al Hidayah	45	24	3
4	PKBM Bina Pelita Mandiri	61	8	14
5	PKBM Generasi Harapan	42	21	13
	Jumlah	356	152	72

Tabel 1 menunjukkan bahwa permasalahan data residu peserta didik masih ditemukan pada seluruh satuan pendidikan nonformal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Residu data paling dominan ditemukan pada aspek NISN dan ketidaksesuaian NIK peserta didik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa validitas data kependudukan masih menjadi kendala utama dalam tata kelola pendidikan nonformal berbasis Dapodik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian, ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi tata kelola pendidikan nonformal pada SPNF SKB di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Faktor-faktor tersebut

berkaitan dengan aspek regulasi dan standar operasional prosedur, mekanisme pengendalian data, serta kualitas data kependudukan peserta didik dalam sistem Dapodik. Ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh yang berbeda terhadap proses validasi, sinkronisasi, dan integrasi data pendidikan nonformal. Adapun sintesis faktor determinan tata kelola pendidikan nonformal disajikan pada Tabel 2 berikut.

**Tabel: 2 Faktor Determinan Tata Kelola Pendidikan Nonformal**

<b>Faktor Determinan</b>	<b>Temuan Penelitian</b>	<b>Dampak terhadap Tata Kelola</b>
Regulasi dan SOP	SOP belum tertulis	Pengelolaan data tidak seragam
Pengendalian data	Monitoring belum konsisten	Validasi data lambat
Kualitas data kependudukan	Banyak NIK tidak sinkron	Data residu tinggi

Tabel 2 menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan merupakan faktor paling dominan dalam tata kelola pendidikan nonformal. Dibanding faktor regulasi dan pengendalian data, kualitas identitas kependudukan peserta didik memiliki pengaruh langsung terhadap proses validasi, sinkronisasi, dan integrasi data pendidikan dalam sistem Dapodik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pendidikan nonformal tidak hanya berkaitan dengan aktivitas administratif penginputan data, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola informasi publik yang membutuhkan validitas, integrasi, dan konsistensi data. Dalam perspektif administrasi publik, data merupakan instrumen strategis dalam mendukung efektivitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan organisasi (Pasolong 2019). Oleh karena itu, kualitas data kependudukan menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas tata kelola pendidikan nonformal berbasis sistem informasi.

### ***Kualitas Data Kependudukan dalam Tata Kelola Pendidikan Nonformal***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan peserta didik menjadi faktor utama dalam proses validasi data pendidikan nonformal. Ketidaksihesuaian data kependudukan ditemukan dalam bentuk perbedaan nama peserta didik, tanggal lahir, tempat lahir, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) antara dokumen administrasi kependudukan dengan dokumen pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan data peserta didik tidak dapat tervalidasi secara otomatis dalam sistem Dapodik sehingga masuk dalam kategori data residu

Secara normatif, validitas data kependudukan merupakan syarat utama dalam tata kelola pendidikan nasional. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan pendataan secara akurat, valid, dan berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 menekankan pentingnya integrasi pelayanan publik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan

---

nasional menempatkan kualitas data kependudukan sebagai dasar utama dalam proses validasi peserta didik.

Pada pendidikan nonformal, kualitas data kependudukan menjadi persoalan yang lebih kompleks dibanding pendidikan formal. Hal ini disebabkan oleh karakteristik peserta didik yang heterogen, mobilitas peserta didik yang tinggi, serta kondisi administrasi kependudukan yang sering mengalami perubahan. Sebagian peserta didik pendidikan nonformal berasal dari kelompok masyarakat yang belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan atau masih menggunakan dokumen lama yang belum diperbarui. Akibatnya, proses sinkronisasi data pendidikan dengan sistem administrasi kependudukan sering mengalami hambatan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Bigovic, Santosa, dan Putri (2026) yang menjelaskan bahwa penurunan validitas dan kelengkapan data Dapodik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, terutama kualitas dokumen administrasi peserta didik serta lemahnya integrasi data antar sistem. Penelitian Rodiyah et al. (2024) juga menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan data Dapodik pada era digital sangat bergantung pada kualitas data dasar yang digunakan dalam proses validasi sistem. Dengan demikian, kualitas data kependudukan merupakan fondasi utama dalam mendukung tata kelola pendidikan berbasis data.

Dalam perspektif kebijakan publik, tata kelola data pendidikan merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis digital yang membutuhkan integrasi antar sistem administrasi pemerintah. Tumbel (2024) menjelaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan sistem pengendalian administrasi. Oleh karena itu, kualitas data kependudukan menjadi faktor strategis dalam mendukung efektivitas tata kelola pendidikan nonformal berbasis sistem informasi. Data yang tidak valid menyebabkan proses administrasi berjalan tidak efektif dan menghambat kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut terlihat dalam tata kelola pendidikan nonformal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di mana ketidakvalidan data kependudukan menyebabkan proses sinkronisasi data peserta didik memerlukan perbaikan secara berulang sebelum dapat tervalidasi dalam sistem Dapodik.

### ***Kualitas Data Kependudukan dalam Tata Kelola Pendidikan Nonformal***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses validasi dan sinkronisasi data peserta didik pada pendidikan nonformal masih menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis. Ketidaksesuaian data kependudukan menyebabkan sistem Dapodik tidak dapat melakukan validasi otomatis sehingga operator satuan pendidikan harus melakukan verifikasi dan perbaikan data secara berulang. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi pendidikan menjadi lebih lambat dan memengaruhi efektivitas pelayanan pendidikan nonformal.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola data pendidikan nonformal belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengendalian data yang optimal. Dalam teori fungsi manajemen George R. Terry, pengendalian (*controlling*) merupakan proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi agar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Tumbel 2023a). Fungsi

---

pengendalian memiliki peran penting dalam menjamin kualitas hasil kerja organisasi, termasuk dalam pengelolaan data pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses monitoring dan validasi data peserta didik pada pendidikan nonformal masih dilakukan secara situasional dan belum berjalan secara konsisten. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian data residu peserta didik sering mengalami keterlambatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Azizah et al. (2024) yang menjelaskan bahwa implementasi manajemen pelayanan publik berbasis Dapodik masih menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan kualitas data pendidikan, terutama pada aspek pengendalian dan validasi data.

Selain itu, proses sinkronisasi data pendidikan nonformal juga dipengaruhi oleh koordinasi antar pihak yang belum berjalan optimal. Pengelolaan data pendidikan melibatkan operator satuan pendidikan, admin Dapodik, Dinas Pendidikan, serta instansi kependudukan. Namun, koordinasi antar lembaga dalam proses validasi data masih bersifat administratif dan belum terintegrasi secara efektif. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian permasalahan data peserta didik memerlukan waktu yang relatif lama.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Fajri, Sofyan, and Niswanto (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi Dapodik sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan kelembagaan, khususnya dalam koordinasi antar pelaksana dan integrasi sistem informasi pendidikan. Penelitian Aini, Rulinawaty, dan Wijaya (2024) juga menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi manajemen berbasis Dapodik sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi organisasi dan kemampuan pengelolaan data pada institusi pendidikan.

Dalam perspektif *New Public Management*, organisasi publik dituntut mampu menyelenggarakan pelayanan berbasis efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Edward, Adnan, dan Khaidir (2024). Pengelolaan data pendidikan berbasis Dapodik merupakan bagian dari transformasi administrasi publik menuju pelayanan berbasis digital. Namun, efektivitas transformasi tersebut sangat bergantung pada kualitas data dasar yang digunakan dalam sistem pelayanan publik. Ketika kualitas data kependudukan rendah, maka efektivitas tata kelola pendidikan berbasis digital juga akan mengalami hambatan.

### ***Kualitas Data Kependudukan dalam Tata Kelola Pendidikan Nonformal***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan merupakan faktor paling dominan dalam menentukan efektivitas tata kelola pendidikan nonformal. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengaruh ketidakvalidan identitas peserta didik terhadap proses validasi data pendidikan, sinkronisasi data, serta pelayanan administrasi pendidikan nonformal.

Ketidakvalidan data kependudukan menyebabkan peserta didik mengalami kendala dalam proses validasi NISN, penerbitan ijazah, penyaluran bantuan pendidikan, serta layanan administrasi pendidikan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan tidak hanya berdampak pada

---

sistem administrasi pendidikan, tetapi juga berdampak langsung terhadap hak peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa tata kelola pendidikan nonformal berbasis Dapodik memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kualitas data kependudukan masyarakat. Semakin baik kualitas data kependudukan peserta didik, maka semakin efektif proses validasi dan integrasi data pendidikan dalam sistem nasional. Sebaliknya, kualitas data kependudukan yang rendah menyebabkan proses administrasi pendidikan menjadi tidak efisien dan menghambat kualitas pelayanan publik pendidikan.

Dalam teori POAC George R. Terry, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh efektivitas proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (Mashady, 2023; Rifaldi dan Nuri 2023). Dalam penelitian ini, kualitas data kependudukan menjadi faktor yang memengaruhi seluruh proses manajemen tata kelola pendidikan nonformal, mulai dari proses pendataan peserta didik, validasi administrasi, hingga pengawasan data pendidikan dalam sistem Dapodik.

Temuan penelitian ini juga memperkuat penelitian Julian, Hilman, and Refly (2024) yang menjelaskan bahwa penerapan sistem Dapodik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik pendidikan apabila didukung oleh kualitas data yang valid dan terintegrasi. Dengan demikian, kualitas data kependudukan tidak hanya menjadi aspek administratif, tetapi juga menjadi determinan utama dalam efektivitas tata kelola pendidikan nonformal berbasis sistem informasi.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan merupakan determinan utama dalam tata kelola pendidikan nonformal pada SPNF SKB di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Validitas identitas peserta didik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas proses validasi, sinkronisasi, dan integrasi data pendidikan dalam sistem Dapodik. Tata kelola pendidikan nonformal berbasis data tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis penginputan data, tetapi juga oleh kualitas administrasi kependudukan peserta didik yang digunakan dalam sistem pendataan pendidikan nasional. Selain itu, efektivitas tata kelola pendidikan nonformal dipengaruhi oleh dukungan regulasi, mekanisme pengendalian data, serta koordinasi antar pengelola data pendidikan dan instansi terkait. Oleh karena itu, peningkatan kualitas data kependudukan dan penguatan pengendalian data menjadi kebutuhan penting dalam mendukung tata kelola pendidikan nonformal yang akurat, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aini, Sarifa, Rulinawaty Rulinawaty, and Andi Wijaya. 2024. "Dapodik Application-Based Management Information System at The Malinau Regency Education Office (Teacher Certification Study)." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 10(2): 361. doi:10.32884/ideas.v10i2.1724.
- Amalia, Galuh Ajeng Fildzah, Fira Aprilia Nur Rahma, Tri Cahyo Kuswarian, and Hesti Kusumaningrum. 2025. "POAC Dalam Transformasi Manajemen

- Sekolah : Dari Teori Ke Praktik UIN Syarif Hidayatullah , Indonesia Signifikan . Berbagai Metode Dan Rancangan Pembelajaran Sudah Disusun Sedemikian Rupa Untuk Kondisi . Bimbingan Dan Konseling Merupakan Salah Satu Kompon." *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan* 2(1): 133-47.
- Angga, W Harahap. 2022. "Implementasi Kebijakan Satu Data Dalam Mengelola Data Pokok Peserta Didik Dengan Menggunakan Aplikasi Dapodik Versi 2021.C Di SMA Negeri 4 Binjai." 11(1).
- Ariani, Safrina. 2024. "Jenis Pendidikan Nonformal Di Indonesia." *Educator Development Journal* 2(September): 68-87.
- Azizah, Feby Nur et al. 2024. "Implementasi Manajemen Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Dapodik." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3(4): 500-514.
- Bigovic, Aliya Izet, Sedy Santosa, and Esa Cahyaning Putri. 2026. "Evaluasi Kualitas Data Pokok Pendidikan : Menelisik Faktor Internal Dan Eksternal Penurunan Validitas Dan Kelengkapan Data Di Yogyakarta." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 15(1): 603-14.
- Dunn, William N. 2011. *Public Policy Analysis*. Fifth. New Jersey: Pearson Education : New Jersey.
- Edward, Aurelia Valentin, M Fachri Adnan, and Afriva Khaidir. 2024. "New Public Manajemen: Studi Kasus Penerapan New Public Manajemen Dalam Organisasi Publik Di Indonesia." *The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2(2): 54-62.  
doi:<https://doi.org/10.61579/future.v2i2.97>.
- Fajri, Munawar, Hizir Sofyan, and Niswanto. 2025. "Institutional Challenges in Implementing DAPODIK as a Basis for Education Decision-Making in Indonesia." *Journal of General Education and Humanities* 4(4): 2007-20.
- Julian, Rafdi Setiawan, Hilman, and Badar Refly. 2024. "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Sistem Dapodik Pada SMPN 8 Kota Tangerang Selatan." 10(5): 483-90.
- Mashady, Ahmad Hadik. 2023. "Fungsi Manajemen POAC Dalam Pengelolaan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Industri Di SMK Babussalam Pagelaran." *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 3(6): 15-26.  
<https://doi.org/10.51903/bersatu.v3i6.1426>.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta.
- Putu, Tirka Widanti. 2022. "Implementasi Kebijakan Interdependensi Fakta-Nilai Dalam Proses Penginputan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Di Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama Green School Bali." *JURNAL PAPTUNG* 5(1): 88-93.
- Rifaldi, Dwi Syahputra, and Aslami Nuri. 2023. "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry." *Manajemen Kreatif Jurnal* 1(3): 51-61.  
doi:10.55606/makreju.v1i3.1615.
- Rodiyah, Isnaini, Eni Rustianingsih, Fira Arma, and Atus Solicha. 2024. "Optimizing Dapodik Data Management in the Digital Era : Case Study of SMA Negeri 1 Krian." *Indonesian Journal of Public Administration* (4): 1-8.
- Tumbel, Goinpeace H. 2023a. *Metode Penelitian Administrasi*. Tangguh Denara Jaya Publisher.

<https://repository.tdjpublisher.com/index.php/katalogtdj/article/view/290>.

- — —. 2023b. *Teori Administrasi Publik*. Penerbit Lakeisha. <https://perpuskita.perpustakaanadigital.com/detail/teori-administrasi-publik/116276>.
- — —. 2024. *Kebijakan Publik: Konsep Dan Model Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan*. Tangguh Denara Jaya Publisher. <https://repository.tdjpublisher.com/index.php/katalogtdj/article/view/82>.